



# KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

## http://kliping.dpr.go.id

Judul : Semua Fraksi di DPR "Ceroboh"  
Tanggal : Sabtu, 22 Februari 2020  
Surat Kabar : Indo Pos  
Halaman : 4

## Semua Fraksi di DPR 'Ceroboh'

Istana Ikut Bereaksi soal RUU Ketahanan Keluarga

JAKARTA. Seluruh fraksi yang ada di DPR RI dikatakan sangat ceroboh. Sejauh ini, meski telah memberikan persetujuan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga yang saat ini menjadi kontroversi, masuk ke dalam pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020.

"Ketika Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi mengatakan, walaupun RUU Ketahanan Keluarga diusulkan oleh lima anggota DPLI lintas fraksi, namun semua fraksi telah menyentui masuk dalam pembahasan Prolegnas Prioritas tahun 2020. Artinya, ya ceroboh, kalau seluruh fraksi yang ada di DPR RI ikut menyentui, walaupun, ya kita kembali mempertanyakan, waktu itu kenapa ikut menyentui," ujarnya kepada INDOPOS di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (21/2).

Politikus Partai Persatuan Perjuangan (PPP) itu menegaskan, dalam tahap pembahasan Prolegnas Prioritas di Baleg, pihaknya sudah meminta agar RUU Ketahanan Keluarga diharmonisasikan dengan dua RUU lain, yakni RUU Kependidikan Ibu dan Anak dan RUU Kependidikan dan Keluarga Nasional. Nar奴n, pengusul tetap bersikukuh agar RUU tersebut tetap diajukan.

"Para pengusul bersikukuh bahwa RUU ini diajukan masing-masing, dan sudah kita a-

ranya misal para pengusul menganggap perlu bahwa saat ini waktunya mempresentasikannya ke Baleg," ujarnya.

Namun, melihat banyaknya pro-fraksi yang pihak terkait isi dari RUU Ketahanan Keluarga, ia melihat adanya peluang bahwa RUU tersebut tidak akan dilanjutkan pembahasannya. Sebab, sejumlah fraksi pun sudah menyatakan menolak usulan tersebut.

"Karena sudah membimbulkan perolakan-penolakan, bahkan ada beberapa fraksi yang tidak terima ikut menganggap usulan dari pengusul. Itu sebabnya menurut kami apologi saja," imbuhnya.

Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, sebagian besar anggota fraksinya tidak mendukung RUU Ketahanan Keluarga. Ia menegaskan, Fraksi Gerindra tidak pernah mengusulkan RUU tersebut.

"Sebagian besar sudah me-

lakukan diusulkan secara pribadi oleh anggota DPR dari Partai Gerindra, Sodik Mudajahid.

"Sehingga pada saat ini kami tidak bisa menyatakan mencabut dukungan apa pun karena kami tidak mengusulkan pengusulan secara fraksi," katanya.

Dasco mengungkapkan, Gerindra rencananya akan memanggil Sodik guna meminta klarifikasi terkait usulan RUU tersebut. Ia mengaku bahwa RUU itu setelah dipantau lebih lanjut memang menimbulkan kontroversi dalam beberapa hari belakangan.

Menurutnya, kontroversi dapat terpantau dari ramainya pendapat yang masuk ke DPR maupun media dan media sosial. Keberadaan RUU itu akan menjadi perhatian besar bagi Gerindra sebelum

66  
Artinya, ya ceroboh, kalau sekaran ada fraksi yang mempertanyakan, ya kita kembali mempertanyakan, waktu itu kenapa ikut menyentui.  
**Achmad Baidowi**  
Wakil Ketua Baleg DPR RI

CHARLES INGKOS

itu merupakan usulannya secara pribadi bersama empat anggota di DPR RI lainnya.

"Sebetulnya itu usulan pribadi dan memang sudah ditarik," kata Endang kepada INDOPOS, kemarin. Dia menjelaskan, ide dasar pengusulan RUU Ketahanan Keluarga adalah untuk perlindungan dan obat-obatan terlarang (narkoba) serta kekerasan seksual yang meningkat di tengah masyarakat.

Endang juga menegaskan rancangan regulasi

gahan terbaik terhadap berbagai hal itu adalah melalui keluarga. Menurutnya, kondisi keluarga yang rapuh berpotensi membuat anak-anak terjerumus dalam narkoba hingga sesek sebas.

"Kami berharap solusi utamanya pencegahan yang paling baik harus dilakukan jauh dari sana, dan yang terjadi sejauhnya saja ularikan di atas," ucap Endang.

Terpisah, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono menilai, RUU Ketahanan Keluarga usulan DPR terlalu menyentuh ranah pribadi. RUU ini diketahui dibuat kritis di media sosial dan menjadi kontroversi.

"Saya enggak tahu sih, tapi katanya ada pasal yang mewajibkan anak laki-laki perempuan pisah kamar. Terlalu menyentuh ranah pribadi," ujar Dini di Kantor Sekretariat Kabinet Jakarta, Jumat (21/2).

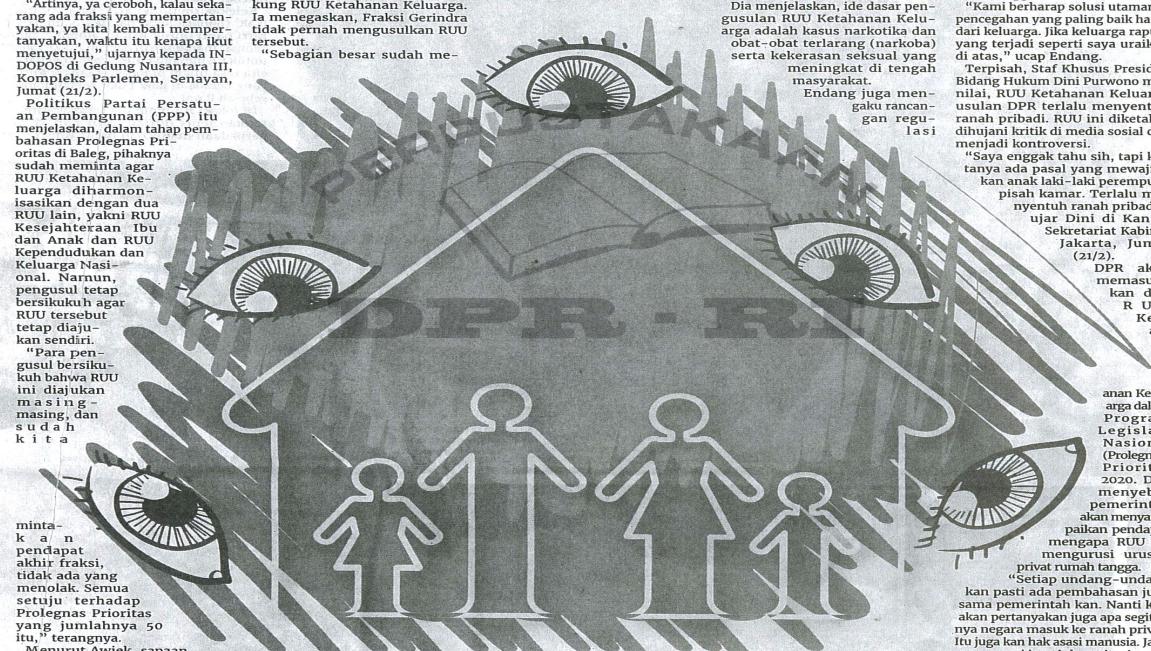
DPR akan memaukan draf R U U Ket- ah-

anan Keluarga dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 ini menyebut pemerintah akan menyampaikan pendapat mengapa RUU ini mengurus urusan privat rumah tangga.

"Setiap undang-undang kan pasti ada pemimpinnya juga sama pemerintah kan. Nanti kita akan pertanyakan juga apa segitiga negara masuk ke ranah privat. Itu juga kan hak asasi manusia. Jangan sampai juga inkonstitusional," jelasnya.

Dini menuturkan, hingga kini pengusulan belum dimulai. Draf RUU Ketahanan Keluarga dari DPR. Dalam pembahasannya, dia berharap agar RUU tersebut tak melewati hak asasi manusia.

"Kan ujung-ujungnya kita musti lihat sesuai konstitusi kan. Kalau sampai dianggap itu melanggar hak asasi manusia, ya inkonstitusional lah," kata Dini. (aen)



minta-kita n  
Pembatasan  
Pemimpin  
ketidaksa-  
tak, tidak ada yang  
menolak. Semua  
setuju terhadap  
prolegnas Prioritas  
yang jumlahnya 50  
itu," terangnya.

Menurut Awiek, sapaan akrabnya, alasan sejumah fraksi berpihak pada usulan ini dari RUU Ketahanan Keluarga karena saat pengusulan, draf RUU tersebut belum diserahkan secara resmi. Saat itu, pengusul hanya menyampaikan judul serta naskah akademik dari RUU tersebut.

"Kita tahu menyentuh pada substansi draf RUU nya, karena draf RUU nya baru disampaikan para pengusul saat kemudian. Di anta-

nyatakan tidak mendukung, tapi secara fraksi nanti akan diputuskan," kata Dasco kepada INDOPOS di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (21/2).

Di mengatakan, Gerindra terlebih dahulu akan meminta klarifikasi dari kader partai yang mengusung RUU tersebut. RUU tersebut bukan inisiatif fraksi partai me-

melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap rancangan konstitusi yang dimaksud.

Seimentara itu, Endang Maria Astuti, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar yang menjadi salah satu pengusul menyatakan menarik diri dari pengusulan RUU Ketahanan Keluarga. Ia mengaku, rancangan regulasi

itu merupakan bentuk keprihatinan yang melihat adanya pelanggaran di sekolah, dari SD hingga SMA yang telah menjurus ke arah seleksi bebas.

"Perlakuan anak-anak SD, SMP, SMA yang sudah mengarah ke seks bebas dan tiba-tiba anak SMP melahirkan tanpa dia tahu sudah hamil. Itu sangat memprihatinkan pribadi saya," ucapnya.

Dia melanjutkan, cara pence-